

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Halim, Diana. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Kusdarini, Eny. 2011. *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Marbun, S.F., dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, S.H, 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pudyatmoko, Y.Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarno, Siwanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumardjono, Maria S.W. 1991. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht. E. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Surabaya : Pustaka Tirta Mas.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Makalah

Kurniawan Nur Shidiq. 2014. Pengawasan Terhadap Pembuatan Izin Reklame Dan Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Dimas Pradiantama. 2017. Hambatan Dalam Penertiban Reklame Di Yogyakarta Dan Solusi Hukum Untuk Permasalahan Tersebut. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sjahan Basah. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, makalah penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan* di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Jimly Asshidiqie. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 16 Februari 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60).

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Kontruksi Reklame.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Internet

Agregasi Harian Jogja, “Dewan Minta Pemkab Bantul Tindak Reklame Ilegal”, <https://news.okezone.com/read/2017/01/12/510/1589466/dewan-minta-pemkab-bantul-tindak-reklame-ilegal> diakses 24 September 2018.

Ahmad Syarifuddin, “Potensi Kebocoran Pajak Reklame di Kota Yogyakarta Sekitar Rp 935 Juta”, <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/14/potensi-kebocoran-pajak-reklame-di-kota-yogyakarta-sekitar-rp953-juta>, diakses 3 November 2018.

Eka Arifa Rusqiyati, “Perda Reklame Yogyakarta Berlaku Penuh”, <https://jogja.antaraneews.com/berita/339620/perda-reklame-yogyakarta-berlaku-penuh> diakses 3 November 2018.

Heri Sidik, “Pemkab Bantul Diminta Tegas Tegakkan Perda Reklame”, <https://jogja.antaraneews.com/berita/344193/pemkab-bantul-diminta-tegas-tegakkan-perda-reklame> diakses 24 September 2018.

Dwi Iwa, “Puluhan Pepohonan dan sejumlah reklame ambruk”, <https://www.radarjogja.co.id/2014/01/13/puluhan-pepohonan-dan-sejumlah-papan-reklame-ambruk> diakses 21 Januari 2019.